

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut dalam hajat hidup orang yang banyak sehingga menjadi patokan utama untuk perekonomian nasional. UMKM juga merupakan kelompok per-ekonomian terbesar dalam per-ekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian Nasional dimana dalam masa krisis ekonomi, serta menjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah salah satu bidang usaha yang paling tepat dan bisa berkembang dan konsisten dalam per-ekonomian nasional. UMKM menjadi andalan untuk menciptakan tempat tenaga kerja yang produktif bagi Indonesia (Maiti & Bidinger, 2020).

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yaitu usaha yang bersifat tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan di Indonesia, keahlian atau keterampilan pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit, serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. Hal tersebut diperlukan karena dunia semakin bersaing dan hanya negara yang memiliki masyarakat yang jiwa wirausahaan mampu menunjukkan kekuatan di masa globalisasi ini. kewirausahaan sangat diperlukan dari sikap-sikap yaitu : ulet, kreatif, inovatif, dinamis, beretos kerja tinggi, disiplin, antisipatif, mampu menciptakan keputusan yang tepat sehingga, memperkecil risiko yang didapati (Hesti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi, Abdul Juli Andi Gani, 2019).

Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang paling penting dan strategi. Pertama, dikarenakan jumlahh industri yangg besar terdapat dalam setiap sektor ekonomi Indonesia. Kedua, dapat

suatu potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja baru. suatu investasi pada sector usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menciptakan lebih banyak tenaga kerja baru jika dibandingkan pada suatu investasi yang sama pada usaha besar. Ketiga, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto untuk membentuk suatu bidang usaha yang sangat baik untuk bagi Indonesia (Nur, 2017).

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan maupun dihindarkan bagi masyarakat saat ini. (UMKM) Usaha mikro kecil dan menengah sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian. Selain itu juga memunculkan kreatifitas yang sama dengan usaha untuk mempertahankan ekonomi Daerah maupun Kabupaten sehingga perekonomian menjadi stabil, Sebagaimana Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: (a) memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan, (b) meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, (c) membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru (Maiti & Bidinger, 2020).

Berdasarkan ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah supaya tercipta kualitas wirausaha yang mandiri di masyarakat. Masyarakat harus diberdayakan agar kualitas sumber daya manusia bisa meningkat. Sehingga produk yang berkualitas untuk meningkatkan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat (Nur, 2017).

Indonesia salah satu negara Asia Tenggara yang aktivitas ekonominya yang besar. Indonesia adalah negara terbesar ke-10 di dunia berdasarkan kualitas daya beli dari Anggota G-20, kelompok 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Dari tahun ke tahun *Produk Domestik Bruto* Indonesia meningkat drastis, dari USD 165.021 miliar di tahun 2000 menjadi USD 932.259 miliar pada tahun 2016. Laporan dari McKinsey

Global Institute memprediksikan bahwa Indonesia akan menjadi negara peringkat ke-7 ekonomi terbesar dunia pada tahun 2030 nanti. *market opportunity* pada sektor dinas dan tenaga kerja, untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah untuk dapat pekerja terlatih (permana, 2017).

Sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi paling dominan dan berperan penting pada perekonomian Indonesia. Di Jawa Barat dengan perbandingan di tahun 2016 usaha mikro kecil (UMK) 98,5% sebanyak 4.634.807 unit dengan (BPS, 2016).

Cibitung Kabupaten Bekasi termasuk yang berhasil menduduki posisi ketiga dari sepuluh kota besar yang penggerak ekonomi terbesar di Indonesia pada tahun 2017. Statistik sektor Laju Pertumbuhan Ekonomi Cibitung Kabupaten Bekasi periode 2013 - 2017 dapat dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan Nasional. Jika dilihat dari statistik ini, sangat terlihat sekali bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bekasi dari periode 2013 sampai dengan 2017 termasuk paling tinggi apabila dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan juga masih di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi, 2019).

Begitu juga pernyataan menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jabar Kusmana Hartadji (2020), sebanyak 47.605 pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dari wilayah Cibitung Kabupaten Bekasi yang akan menerima bantuan selama *pandemic*. Seperti yang dilihat dari data tersebut bahwa Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ini merupakan sumber pendapatan primer maupun sekunder bagi banyak keluarga kecil dan kelompok masyarakat tertentu (Permana, 2017).

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kab bekasi yang mempunyai peran penting di bidang koperasi dan usaha mikro. Penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kab bekasi kepada masyarakat pada dasarnya untuk

memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan (Primatami & Hidayati, 2019).

Memperdayakan sektor ekonomi dan lapisan rakyat yang masih Peranan dinas koperasi dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menyatakan ada dua, yaitu :

pertama Memberi peluang agar dalam sektor ekonomi masyarakat modern dapat tetap maju, karena kemajuan ekonomi dibutuhkan untuk membangun bangsa secara keseluruhan. tertinggal yang hidup di luar atau pinggiran jalur kehidupan modern dapat dilalui, 1). Menciptakan suasana yang memungkinkan bagi masyarakat yang bisa berkembang di setiap usaha masyarakat memiliki potensi, 2). untuk memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat melalui pemberian berupa sebuah bantuan dana dari pemerintah pusat 3). mengembangkan lembaga pendanaan, atau penelitian dan pemasaran daerah. menyatakan ada empat strategi untuk memperdayakan masyarakat dalam suatu bidang usaha, yaitu pertama memperdayakan masyarakat dalam mensosialisasikan peran masyarakat dalam subyek untuk pemasaran daerah.

Kedua, untuk menggunakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan atau memberdayakan masyarakat secara aspiratif, demokratis, efektif dan efisien untuk. Ketiga, mobilisasi sumberdaya manusia seperti tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya. Keempat, memaksimalkan peran pemerintah. maka hal yang perlu dapat diupayakan dalam mengembangkan UMKM, yaitu, pertama menciptakan bidang Usaha yang Kondusif, dan pemerintah perlu mengupayakan terciptanya usaha mikro kecil dan menengah yang sangat kondusif. Kedua, bantuan permodalan, pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi masyarakat untuk ber-UMKM. Ketiga, perlindungan Usaha, dalam jenis-jenis dalam usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi yang lemah, harus mendapatkan

perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bertuju kepada saling menguntungkan (*win-win solution*).

Keempat, untuk mengembangkan mitra usaha itu perlu sekali untuk mendapatkan yang dikembangkan kemitraan untuk saling membantu antar bidang UMKM. Atau UMKM antar pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindari terjadinya satu monopoli dalam bidang usaha UMKM. Kelima, pelatihan, pemerintah itu perlu meningkatkan satu pelatihan bagi UMKM yang baik dalam aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilan dalam satu bidang usahanya. Keenam, untuk membentuk suatu lembaga Khusus, itu perlu untuk dibangun suatu lembaga yang khusus dan bertanggung jawab dalam mengkordinasikan semua kegiatan bidang UMKM. Ketujuh, untuk memantapkan asosiasi, yang telah ada diperkuatkan dalam bidang usaha. Kedelapan, untuk mengembangkan suatu usaha dalam mempromosikan usaha agar semakin berkembang dalam mempercepat suatu proses, kemitraan antar UMKM dengan usaha besar untuk diperlukan kepada media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan dalam bidang usaha. Kesembilan, perkembangan suatu kerjasama yang setara, serta adanya kerjasama atau koordinasi yang seimbang antar pemerintah dengan dunia usaha (UMKM) (Depkop, 2018).

Permasalahan UMKM pada umumnya dapat dibedakan menjadi masalah internal dan eksternal, yaitu: a) Rendahnya kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam pemasaran, manajemen, organisasi, dan teknologi; b) Lemahnya dalam berkompetensi kewirausahaan; c) Keterbatasannya dana untuk mengakses permodalan UMKM, informasi teknologi dan pemasaran, serta faktor produksi lainnya. a) Serta besarnya biayanya transaksi akibat kurangnya dukungan dalam bidang usaha b) usaha praktik yang tidak sehat; c) Keterbatasan informasi dan jaringan pendukung usaha. d) dan Selain itu, UMKM merupakan yang menghadapi tantangan yang disebabkan oleh besarnya berkembangnya globalisasi ekonomi dan liberalisasi

perdagangan bersamaan dan cepatnya berkembang teknologi (Hesti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi, Abdul Juli Andi Gani, 2016).

Dari permasalahan itu salah satu upaya serius pemerintah dalam mengembangkan suatu bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah alternatif yang mengembangkan sistem kualitas sumber daya manusia dalam rangka untuk penanggulangan angka kemiskinan dan pengangguran untuk membentuk lembaga khusus yang ada dalam tugas pokok dan fungsi (UMKM) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Depkop, 2018).

Pemerintah Dinas Koperasi khususnya yang berada di Kab Bekasi merupakan salah satu perangkat Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari suksesor implementasi kebijakan dan pelaksana pembangunan Pemerintah Kab Bekasi, lahir guna dalam untuk membantu melaksanakan suatu otonomi daerah, di Dinas Koperasi ini untuk bertanggung jawab melaksanakan suatu tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu untuk bertugas lebih menitikberatkan kepada pelayanan publik dalam bidang pelayanan perindustrian perdagangan dan koperasi serta UMKM dalam memperlancar roda perekonomian, mendorong pertumbuhan kab melalui kegiatan jasa dan perdagangan (Setyawati, 2017).

Pentingnya pelayanan tersebut untuk meningkatkan sentra-sentra industri perdagangan dan koperasi serta UMKM dalam menunjang Visi Kab Bekasi, yaitu Terwujudnya Kabupaten Bekasi yang Demokratis, Produktif, Berdaya Saing dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Melalui Penguatan Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata Pada Tahun 2017 sehingga kesejahteraan masyarakatnya dapat lebih terjamin dan tingkat pengangguran di Kab. Bekasi ini pun dapat di minimalisir (Disperindagkop, 2018)

Penelitian ini memfokuskan pada masalah pengembangan dan peran yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kab bekasi terhadap pengusaha-pengusaha UMKM pada lingkup wilayah Cibitung Kab Bekasi. Kegiatan yang ada pada peran Dinas Koperasi ini adalah salah satu kegiatan yang berada pada sub bagian Koperasi dan Pengusaha Mikro Kecil

Dan Menengah (PMKM), yang dimana didalamnya terdapat kegiatan pembinaan, pengembangan, dan kelembagaan sehingga dari kegiatan tersebut sangat membantu meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dari pendapatan perkapita masyarakat Cibitung Kab. Bekasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitasi pihak eksternal maupun internal pada kelompok usaha maka dari itu, masalah yang di angkat penulis dalam pengembangan dan peran yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap para pengusaha di Cibitung Kab bekasi adalah terdapat pada proses berjalannya pengembangan kepada masyarakat yang dilakukan.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH OLEH DINAS KOPERASI DI KABUPATEN BEKASI**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Dinas Koperasi di Kabupaten Bekasi ?
2. Apas saja Kendala dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bekasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian, secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang Peran Pengembangan Dinas Koperasi dan UMKM Cibitung Kab Bekasi. Secara khusus tujuan penelitian yang ingin dicapai diantaranya meliputi:

1. Menganalisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Dinas Koperasi di Kabupaten Bekasi
2. Menganalisis kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab Bekasi dalam melakukan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Penelitian, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.Sos) di Universitas Islam 45 Bekasi (UNISMA). Serta dapat menambah kontribusi keilmuan tentang UMKM.
2. Akademisi, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan atau masukan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis yang berhubungan dengan peran pengembangan UMKM.
3. Masyarakat, yaitu diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas wawasan mengenai peran pengembangan UMKM.

1.4.2 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan serta dapat memberikan manfaat pembelajaran dalam bentuk teori, informasi, masukan dan dapat menambah wawasan bacaan sebagai bahan referensi bagi pembaca untuk perpustakaan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Negara di Universitas Islam 45 Bekasi (UNISMA).